

## **ANALISIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PARIWISATA**

**Irfan Nursetiawan<sup>1</sup>, Regi Refian Garis<sup>2</sup>**

Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Galuh

e-mail: [irfan.nursetiawan@gmail.com](mailto:irfan.nursetiawan@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Salah satu yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Ciamis pasca beberapa objek wisata masuk ke wilayah Kabupaten Pangandaran, yakni menerapkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website resmi Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Namun belum ada penelitian berkaitan dengan pengaruh SIM terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata. Sehingga peneliti melakukan penelitian berkaitan dengan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data berkaitan dengan analisis sistem informasi manajemen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, didapatkan kesimpulan, sebagai berikut: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif; (2) Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata; dan (3) Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata.*

**Kata Kunci:** *Sistem Informasi Manajemen, Pendapatan Asli Daerah, dan Pariwisata.*

## **A. PENDAHULUAN**

Era pembangunan setelah otonomi daerah dijadikan sebagai landasan dalam terciptanya pemerataan pembangunan di daerah kabupaten atau kota, menjadikan hal tersebut sebagai stimulus bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dimana dalam prosesnya terjadi transformasi penyerahan wewenang dari pemerintah daerah provinsi ke pemerintah kabupaten dan tetap dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sejalan dengan Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 Pasal (1) ayat 6 menyatakan, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pemerintah daerah, khususnya pemerintah kabupaten atau kota mempunyai hak untuk mengurus, mengatur dan mengelola pemerintahannya dan kekayaan daerahnya yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di setiap periodenya. Dilihat dari aspek ekonomi, pemerintah daerah dipacu untuk menjadikan potensi daerah untuk meningkatkan PAD dan salah satunya didapatkan dari pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Kabupaten Ciamis sebagai salah satu bagian dari kewilayahan provinsi Jawa Barat

mempunyai potensi SDA dengan morfologi daratan yang datar bergelombang sampai pegunungan dan dengan luas wilayah 1.433,87 km<sup>2</sup>, pendapatan asli daerahnya berasal dari retribusi kegiatan pariwisata. Namun setelah terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran yang berpisah secara kewilayahan dan administratif dari Kabupaten Ciamis berdampak pada penurunan PAD dari sektor pariwisata cukup besar. Seperti yang dilansir dari ([www.pikiran-rakyat.com](http://www.pikiran-rakyat.com), 2012), PAD rata-rata pertahun dari 10 (sepuluh) kecamatan yang tergabung menjadi Kabupaten Pangandaran sebesar Rp 12 miliar, yang terdiri dari sektor Pariwisata sekitar Rp 3 miliar, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp 3 miliar, serta sumber lainnya seperti pajak reklame, hotel dan restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka Kabupaten Ciamis harus berupaya dalam meningkatkan PAD di sektor pariwisata, setelah Kabupaten Pangandaran secara resmi lahir sebagai DOB di tahun 2012. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Undang-undang nomor 21 tahun 2012, disebutkan bahwa Kabupaten Pangandaran berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis dan terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang Kecamatan Kalipucang, Kecamatan

Pangandaran dan Kecamatan Sidamulih.

Dengan demikian diperlukan sebuah inovasi untuk mendongkrak PAD, khususnya di sektor pariwisata. Karena hal tersebut tidak terlepas dari aspek ekonomi sebagai bagian dari kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Jika dilihat dari aspek ekonomi, maka: (a) daerah merupakan ruang dimana terdapat kegiatan ekonomi; (b) daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu; dan (c) suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang apabila daerah tersebut dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi (Subandi, 2007:116). Namun terdapat masalah dalam pembangunan ekonomi daerah, yakni: (a) adanya ketimpangan sektor industri; (b) kurang meratanya investasi; (c) tingkat mobilitas faktor produksi yang rendah; (d) perbedaan sumber daya alam; (e) perbedaan demografis; dan (f) kurang lancarnya perdagangan antar daerah (R. Didi Djadjuli, 2015). Selain itu tantangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di era globalisasi dihadapkan pada perkembangan teknologi informasi yang menjadikan komunikasi antara masyarakat dengan masyarakat lainnya tidak memiliki batasan dan hal tersebut berkembang menjadi jembatan komunikasi yang dianggap lebih efektif dan efisien. Fenomena perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perilaku

sosial kemasyarakatan. Dengan dunia yang hampir tanpa batas, tentunya menuntut kesiapan dan kecepatan setiap orang dalam melakukan pengolahan informasi.

Perkembangan informasi dan internet berdampak pula kepada pemerintah daerah yang harus memberikan informasi kepada masyarakat dengan media internet. Sehingga muncul sebuah konsep e-government sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan tentunya saat ini kita telah memasuki era keterbukaan informasi publik. Menurut Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Era informasi digital dapat pula dijadikan sebagai media publikasi, sehingga pencapaian kinerja dan transparansi suatu pemerintahan daerah dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas publik terhadap pemerintah. Pengolahan informasi yang benar dan sehat akan membentuk masyarakat madani, serta tata nilai sosial masyarakat yang toleran terhadap berbagai perubahan. Kemudahan akses

informasi yang diberikan oleh pemerintahan, akan membuka ruang dalam membentuk masyarakat global. Era globalisasi telah memberikan dampak positif, salah satunya membuka aktivitas ekonomi secara global. Pada hakekatnya masyarakat global di era digital tidak lepas dari perkembangan informasi yang dapat diperoleh dengan cepat dari internet. Promosi potensi pariwisata Kabupaten Ciamis dapat dilakukan dengan media tersebut. Salah satu wujud adaptif dari pemerintah Kabupaten Ciamis, yakni adanya website tentang pariwisata yang dikelola dibawah tanggung jawab Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Tetapi hal tersebut belum diketahui tingkat efektivitas implementasi penggunaan sistem informasi tersebut terhadap peningkatan PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata. Salah satu implementasi dalam mensinergikan itu semua, yakni dengan integrasi pemasaran dan komunikasi atau sering disebut dengan *Integrated Marketing Communication* (IMC). Adapun menurut Kurnia, Eddy (2013:167) menyatakan pola IMC, terdiri dari: (a) pergeseran dana marketing dari iklan di media menuju bentuk lain dari kegiatan promosi kepada konsumen dan transaksi yang berorientasi pada kegiatan promosi penjualan; (b) pergeseran dari media massa ke media yang lebih spesifik seperti direct mail dan internet; dan (c) teknologi telah membantu meningkatkan pengembangan data base dan berbagai informasi. Oleh

karenanya dalam hal pengembangan sektor pariwisata yang berpotensi meningkatkan PAD suatu daerah kabupaten atau kota dibutuhkan informasi dan data base yang relevan. Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) dapat dengan mudah membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan atau kebijakan terkait peningkatan PAD. Korelasi dan sinergitas penggunaan sistem informasi sebagai sarana informasi publik dengan peningkatan pendapatan retribusi di sektor pariwisata, khususnya di Kabupaten Ciamis belum dilakukan penelitian secara spesifik. Walaupun penerapan sistem informasi di daerah lain juga telah diimplementasikan, namun pada kenyataan dilapangan akan memberikan hasil yang berbeda. Ketimpangan regional secara ekonomi dan teknologi menjadi landasan penelitian ini harus dilakukan. Dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pariwisata."

## **B. LANDASAN TEORITIS**

### **1. Konsep Sistem Informasi Manajemen**

Sistem Informasi Manajemen Sistem informasi sebagai kumpulan komponen dalam sebuah organisasi atau lembaga formal yang berhubungan dengan proses pen akurat dengan melalui analisis yang rasional, serta ilmiah. Kehandalan sistem informasi dalam sebuah lembaga terletak pada keterkaitan antara komponen yang ada. Sedangkan manajemen sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui kinerja dan kerja orang lain sebagai bagian dari aset Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam sebuah organisasi. Dalam implementasi manajemen sebuah organisasi, informasi manajemen merupakan informasi yang diterima oleh para manajer. ciptaan dan aliran informasi. Dengan adanya pendekatan sistem dalam proses manajemen diharapkan pengelolaan data dapat dihasilkan informasi yang cepat, tepat dan akurat dengan melalui analisis yang rasional, serta ilmiah. Kehandalan sistem informasi dalam sebuah lembaga terletak pada keterkaitan antara komponen yang ada. Sedangkan manajemen sebagai proses pencapaian tujuan organisasi melalui kinerja dan kerja orang lain sebagai bagian dari aset Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam sebuah organisasi. Dalam implementasi manajemen sebuah organisasi, informasi manajemen merupakan informasi yang diterima oleh para manajer.

Pada perkembangannya sistem informasi yang mengguakan teknologi informasi yang digunakan dapat berperan dalam strategi biaya, strategi diferensiasi dan strategi inovasi (Susanto.A, 2002:10). Sehingga sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen diberbagai tingkatan dan fungsi manajemen secara umum dan dapat disimpulkan Sistem Informasi Manajemen (SIM) merupakan sekumpulan dari manusia dan sumber-sumber daya modal di dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Begitu pula dengan pemerintahan daerah sebagai salah satu penggerak pembangunan yang membutuhkan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam hal pembangunan infrastruktur maupun non-material seperti pengembangan SDM.

### **2. Pariwisata**

Pengembangan kawasan wisata merupakan sebuah alternatif untuk mendorong potensi ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, kegiatan pariwisata menjadi salah satu penopang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Undang-undang nomor 10 tahun 2009 tentang Pariwisata pasal (1) ayat 3 menyatakan, bahwa Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung

berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sejalan dengan hal tersebut menurut Soemarwoto, Otto (2004:309) menyatakan, bahwa Pariwisata adalah industri yang kelangsungan hidupnya sangat ditentukan oleh baik buruknya lingkungan. Keadaan lingkungan yang baik, maka industri pariwisata akan berkembang dengan baik pula. Sehingga tumpuan dalam perkembangan industri pariwisata bergantung pada keadaan lingkungan dan akses ke objek wisata. Selain itu informasi pariwisata juga dibutuhkan sebagai penunjang dalam meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. Industri pariwisata tidak akan lepas dari kegiatan kepariwisataan dan daya tarik wisata sebagai stimulus agar wisatawan dapat berkunjung ke objek wisata tertentu. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keaneragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Sedangkan kepariwisataan merupakan keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara, serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha atau pihak swasta. Salah

satu bentuk implementasi sistem informasi pariwisata, yakni dengan adanya sebuah website yang menampilkan profil pariwisata sebuah destinasi wisata. Menurut Adfar. Z dan Sulastri (2014) menyatakan sistem informasi pariwisata berbasis web meliputi daftar obyek wisata alam, wisata religi, wisata kuliner, harga tiket, jadwal pelayaran, biro wisata, daftar hotel dan home stay, harga dan fasilitas hotel.

Berdasarkan model sederhana sistem pariwisata terdapat 5 (lima) elemen pokok dalam sistem pariwisata yaitu: (1) *traveler-generating region*; (2) *departing travele*; (3) *transit route region*; (4) *tourist-destination region*; dan (5) *returning traveler*. Sehingga jumlah kunjungan wisatawan akan berdampak pada maju atau mundurnya sebuah industri pariwisata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung maka semakin baik pula perkembangan industri pariwisata di daerah tersebut, begitu pula sebaliknya. Dapat disimpulkan, bahwa industri pariwisata harus didukung oleh sistem informasi pariwisata yang terintegrasi. Dengan demikian media publikasi dan informasi seperti website sebagai pemandu wisata digital yang cepat dan akurat menjadi alternatif terakhir dalam meraih informasi bagi para wisatawan. Kurangnya pemberian informasi terkini dan jumlah website penyedia wisata yang sangat banyak semakin membuat wisatawan bingung memilih tempat wisata yang tepat (Handayaningsih, 2010). Sehingga industri pariwisata

sulit berkembang karena kurangnya informasi mengenai ulasan suatu objek wisata. Jadi pariwisata merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat rekreatif yang didukung oleh sistem informasi sebagai bagian dari panduan untuk melakukan kegiatan wisata.

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Di tingkat daerah perspektif pengelolaan keuangan merupakan salah satu bentuk kinerja pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan pembangunan yang berkeadilan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tercantum “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.” Sehingga pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

1. Hak daerah memungut pajak-retribusi daerah dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan;
3. Penerimaan daerah;
4. Pengeluaran daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain: uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain; dan
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Salah satu penerimaan daerah, yakni berasal

dari pajak maupun retribusi dan hal tersebut dapat termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Marvin dalam Pratama.dkk (2014:169) menyatakan, bahwa dalam upaya penggalian sumber-sumber pendapatan daerah, bukanlah tanpa masalah. Analisis terhadap objek-objek pendapatan sering tidak berjalan seperti yang diharapkan karena alasan keterbatasan kemampuan sumber daya yang dimiliki dan seringnya rotasi atau mutasi para pejabat-pejabat pemerintah yang berakibat pada banyaknya program-program strategis pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menurut Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagai berikut:

1. Hasil pajak daerah;
2. Hasil retribusi daerah;
3. Hasil perusahaan milik daerah; dan

#### 4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dengan demikian salah satu yang merupakan PAD, khususnya untuk pemerintah daerah dapat berasal dari retribusi kegiatan pariwisata. Selain itu hal tersebut tidak terlepas dari asas kesejahteraan untuk masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan nasional.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan fenomena terkait pengaruh Sistem Informasi Manajemen (SIM) terhadap tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor Pariwisata. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif dapat mempengaruhi substansi penelitian. Artinya bahwa penelitian kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan informan, objek dan subjek penelitian. Adapun uraian secara rinci dari metode yang digunakan meliputi tahapan-

tahapan penelitian, lokasi penelitian, peubah yang diamati atau diukur, model yang digunakan, rancangan penelitian, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Sehingga penelitian kualitatif ini merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya dan bertujuan mengungkapkan gejala secara holistik kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci (Sugianto. E, 2015:8). Dengan demikian dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung induktif. Pemilihan penelitian ini secara kualitatif, karena beberapa alasan, Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sugiyono (dalam Sugianto. E, 2015:11), sebagai berikut:

1. Metode penelitian kualitatif sangat cocok, jika sebuah masalah penelitian belum jelas atau bahkan masih gelap;
2. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami makna dibalik yang tampak;
3. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami interaksi sosial;
4. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami perasaan orang;
5. Metode kualitatif sangat cocok untuk mengembangkan teori, khususnya teori yang dibangun berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan;
6. Metode kualitatif sangat cocok untuk memastikan kebenaran data sosial; dan



7. Metode kualitatif sangat cocok untuk meneliti sejarah perkembangan.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, karena penelitian ini berkaitan dengan interaksi sosial, memastikan kebenaran data dan untuk memahami makna dibalik sebuah fenomena.

#### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan triangulasi penelitian deskriptif kualitatif, terdapat beberapa hal yang ditemukan terkait dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) pemerintah daerah Kabupaten Ciamis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Sistem Informasi Manajemen (SIM) Kabupaten Ciamis termasuk ke dalam *Government to Citizen*. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Schalaeger, Jesper (2013), menyatakan *Government to Citizen* adalah layanan *e-government* dimana pemerintah membangun dan menerapkan pelayanan menggunakan teknologi informasi yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi pemerintah dengan masyarakat. Hal tersebut terlihat dari isi website yang menampilkan beberapa informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentunya berkaitan dengan Kabupaten Ciamis. Perkembangan penerapan *e-government* Kabupaten Ciamis, masuk ke dalam tahap *emergence* dan *enhance*. Dimana dalam tahap ini

website masih menjadi sarana komunikasi satu arah dan website pemerintah daerah Kabupaten Ciamis telah masuk ke dalam tahap *enhance* dibuktikan dengan adanya beberapa tautan yang terhubung ke beberapa informasi, seperti peraturan daerah, dokumen dan laporan. Namun di beberapa submenu, khususnya yang terhubung ke pemerintah desa tidak terhubung ke semua website pemerintah desa yang ada di Kabupaten Ciamis. Adapun tautan yang terhubung hanya ke 6 (enam) desa, yaitu Desa Karangpawitan, Desa Sidamulih, Desa Mekarmulya, Desa Panjalu, Desa Tanjungsari dan Desa Sukahurip. Untuk menu email yang berada di menu utama terjadi error, sehingga tidak terhubung ke email yang diinginkan. Dengan demikian untuk implementasi SIM di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis diperlukan perbaikan secara signifikan untuk beberapa tautan. Sistem informasi pariwisata pemerintah daerah Kabupaten Ciamis telah diimplementasikan pada sebuah website Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis. Di website tersebut sudah terdapat menu berita dan adanya publikasi beberapa acara adat yang diselenggarakan di Kabupaten Ciamis. Selain itu terdapat pula beberapa informasi mengenai objek wisata di Kabupaten Ciamis. Informasi upacara adat yang ditampilkan di website tersebut, diantaranya: Upacara Adat Merlawuh, Upacara Adat Misalin, Upacara Adat Ngikis, dan Upacara

Adat Nyepuh. Sedangkan objek wisata yang ditampilkan, yaitu: objek wisata Tonjong Golok, Puncak Bangku, Sungai Cireong, Situ Gunung Sukamantri, Situ Cihargeulis Cisaga, dan Puncak Bangku.

Sehingga hal tersebut sudah sesuai dengan implementasi dari sistem informasi pariwisata secara umum. Menurut Zainul Adfar dan Sulastri (2014) menyatakan, bahwa implementasi sistem pariwisata bagi penggunaan atau user terdiri dari: (1) Halaman Home User; (2) Halaman objek wisata; (3) Halaman wisata alam; (4) Halaman profil objek wisata; (5) Halaman transportasi; (6) Halaman hotel; (7) Halaman galeri; (8) Halaman news; (9) Halaman testimonial; dan (10) Halaman biro wisata. Kesesuaian website Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan konsep implementasi sistem informasi pariwisata, yakni di website tersebut terdapat menu atau halaman tentang profil objek wisata, news, dan adanya galeri. Tetapi website Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis belum mobile friendly. Artinya website tersebut belum mendukung bagi para pengguna internet yang menggunakan handphone maupun smartphone. Hal tersebut tidaklah heran, dikarenakan kebanyakan implementasi egovernment berupa publikasi informasi oleh pemerintah pada umumnya masih belum mendukung untuk pengguna internet di handphone. Menurut Yelton, Andromeda (2012) menyatakan, bahwa *Government information is often not*

*mobile friendly; increasing accessibility (especially of local information) is one way libraries can serve diverse users. Some libraries are providing services of this type in a desktop oriented way already.* Jadi berdasarkan hal tersebut, maka harus ada perbaikan website pemerintah berbasis desktop bertransformasi ke mobile friendly. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata mengalami fluktuatif. Dimana hal tersebut dapat dilihat dari PAD dari sektor pariwisata mengalami penurunan dan kenaikan. Walaupun untuk implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) di sektor pariwisata dimulai sejak tahun 2014, ternyata cukup berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata dan cukup signifikan. Tetapi jika dilihat dari jumlah arus kunjungan wisatawan, setelah adanya implementasi SIM di sektor pariwisata yang dibuktikan dengan adanya website Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis cukup berpengaruh terhadap jumlah kunjungan dan adanya fluktuatif jumlah kunjungan wisatawan, baik wisatawan nusantara (lokal) maupun wisatawan mancanegara. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditarik sebuah garis besar bahwa implementasi SIM pemerintah daerah Kabupaten Ciamis cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Adapun faktor lain yang berpengaruh dalam meningkatkan PAD di sektor pariwisata Kabupaten Ciamis, selain

dari sistem informasi pariwisata dipengaruhi pula oleh kelengkapan infrastruktur objek wisata, koneksi jalan atau akses ke lokasi objek wisata dan adanya kegiatan atraksi pariwisata. Semakin baik infrastruktur objek wisata, maka semakin baik pula jumlah kunjungan para wisatawan. Selain itu akses jalan ke lokasi objek pariwisata juga mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan, semakin mudah akses jalan ke objek wisata maka semakin banyak jumlah kunjungan wisatawan. Sedangkan atraksi pariwisata merupakan faktor penunjang, karena hanya bersifat ceremonial dan hanya diadakan di hari-hari tertentu. Sehingga hal tersebut dapat mendongkrak jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian semakin banyak jumlah wisatawan, maka semakin meningkat pula jumlah Pendapatan Asli Daerah dari sektor pariwisata.

#### **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis data berkaitan dengan analisis sistem informasi manajemen pemerintah daerah Kabupaten Ciamis dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata, didapatkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata mengalami kenaikan dan penurunan atau bersifat fluktuatif.

2. Implementasi Sistem Informasi Manajemen (SIM) cukup berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis periode tahun 2013 sampai dengan periode tahun 2017 dari sektor Pariwisata.
3. Faktor pendukung dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis dari sektor pariwisata, yaitu kelengkapan infrastruktur objek wisata, akses jalan menuju ke lokasi objek wisata, dan atraksi pariwisata.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

\_\_\_\_\_.(2012). Kabupaten Ciamis Kehilangan PAD Cukup Besar. (online). Tersedia: <http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2012>. [10 Agustus 2018].

Adfar. Z dan Sulastri. (2014). Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web Studi Kasus di Karimunjawa Jepara.6.(2).79-86. Hardjaloka, Loura. (2014). Studi Penerapan E-Government di Indonesia dan Negara Lainnya sebagai Solusi Pemberantasan Korupsi di Sektor Publik. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*.3.(3).435-452.

Heliza, Rahmania. (2009). Perancangan Sistem Informasi Terpadu Pemerintah Daerah Kabupaten

- Paser, Jurnal Informatika Mulawarman.4.(1) Hal. 4754.
- Hoga, Saragih. 2013. Sistem Informasi Lembaga Pemerintahan di Indonesia melalui Electronic Government (E-Government) dengan Open Source Software. Jurnal Teknik dan Ilmu Komputer, UKRIDA.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas.L. (2001). Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Kurnia, Eddy. (2013). Customer is Change. Jakarta: BukuRepublika.
- Lantip, Diat. P. (2013). Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Yogyakarta: UNY Press.
- Pangudiluhur. (2009). Slide Perkuliahan Sistem Informasi Manajemen, (online) Tersedia: <http://www.pangudiluhur.ac.id> [4 Juni 2017].
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pitana, I.G and Diarta, I.K.S. (2009) Sosiologi Pariwisata. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Pratama.Dkk. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. JAB.30.(1). R. Didi, Djadjuli. (2015). Pembangunan Ekonomi dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Jurnal Moderat.1.(4).491-498.
- Schlaeger, Jesper. (2013). E-Government in China: Technology, Power, And Local Government Reform. New York: Routledge.
- Simarmata, Janner. (2007). Perancangan Basis Data. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Soemarwoto, Otto. (2004). Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Jakarta: Djambatan.
- Sugiarto. E. (2015). Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Suaka Media.
- Susanto, Azhar. (2002). Sistem Informasi Manajemen: Konsep dan Pengembangannya. Bandung: Lingga Jaya.